



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 16 SEPTEMBER 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Pensiunan TNI Terima Bansos, Warga Protes Kades Gelam

43 Kepala Desa Mengadu DPRD soal Bantuan Sosial Sasaran

SIDOARJO - Persoalan bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran membuat banyak kepala desa (Kades) di Kota Delta kecewa. Sebanyak 43 kades mengadukan carut-marutnya data penerima ke dewan, Senin (14/9) sore. Mereka berharap ada penyelesaian mengenai masalah tersebut.

Keluhan disampaikan Kepala Desa Gelam Mochamad Muslich. Dia mengaku diprotes warga setelah adanya pensiunan TNI yang menerima bantuan. Sedangkan, masih ada masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih sulit justru belum mendapatkan bantuan.

"Rumah pensiunan itu cukup besar dan megah. Kondisi juga sangat baik," kata Muslich. Dia mengaku kebingungan menghadapi warga. Sebab, data penerima bansos tidak berasal dari desa.

Muslich tidak ingin langsung menyimpulkan bantuan tersebut salah sasaran. Dia justru meminta data penerima kembali diverifikasi. Pengecekan diperlukan untuk memastikan kondisi penerima masih sesuai dengan data desil dan kriteria bantuan. "Saya berharap instansi yang memiliki kewenangan bisa melakukan pengecekan," tambah Muslich.



TEMUAN MASALAH BANSOS

Ada warga yang mendapat rumah sementara sebelum menerima bantuan

Warga merasa pensiunan TNI yang mendapat bantuan

Bantuan juga diterima oleh janda

Kades di protes karena bantuan tidak tepat



Penjual Online Tertuntut Penerima Manfaat

Keluhan juga disampaikan Kades Simorangkat Khairul Khulid. Dia menyebut ada tiga warga yang bermain judi online tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. "Mungkin sewaktu didata mereka belum bermain judi online," katanya.

Kondisi tersebut menunjukkan data penerima bantuan bisa berubah seiring waktu. Karena itu, Khulid menilai verifikasi dan pembaruan data perlu dilakukan secara berkala. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui perubahan kondisi ekonomi warga dan memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarno menyebut persoalan data bansos perlu ditindaklanjuti agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Penerima yang secara nyata sudah mampu perlu dievaluasi. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada verifikasi kondisi ekonomi penerima. "Tidak bisa hanya melihat status. Data penerima harus diverifikasi secara menyeluruh," kata Bangun. (ful/ben)



CEK KONDISI: Wabup Mimik Idayana (kiri) bersama Ketua DPRD Abdullah Nasih (tengah) dan Direktur RSUD Sidoarjo Barat dr Abdullah Segaf Alhadad (kanan) mengunjungi salah satu pasien gagal ginjal kemarin (15/9).

Banyak Aduan, Wabup Mimik Minta RSUD Perbaiki Layanan

SIDOARJO - Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meminta petugas rumah sakit tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pesan tersebut disampaikan saat peresmian Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat kemarin (15/9).

Mimik mengaku masih banyak menerima aduan dari masyarakat mengenai pelayanan di rumah sakit. "Saya itu banyak menerima laporan melalui DM terkait pelayanan rumah sakit dan langsung saya minta segera ditindaklanjuti," katanya.

Dia menilai, keluhan masyarakat adalah hal yang wajar. Namun, persoalan harus diatasi. Mimik mengingatkan agar petugas tidak terlalu membebani pasien dengan prosedur pelayanan. Masyarakat tidak boleh dipinggirkan terkait administrasi.

Direktur RSUD Sidoarjo Barat dr Abdullah Segaf Alhadad menjelaskan, layanan dialisis di rumah sakit telah berjalan sejak 1 September 2026. Hingga Selasa (15/9), tercatat sudah 77 kali pelayanan dialisis diberikan kepada masyarakat. "Kini, masyarakat yang membutuhkan cuci darah tidak perlu mencari layanan terlalu jauh. Terutama pasien di wilayah barat Sidoarjo," ujarnya.

Dia menyebut instalasi dialisis memiliki 14 mesin. Sebanyak 12 mesin digunakan untuk pasien reguler, sedangkan dua mesin lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan pelayanan tertentu. (ful/hen)

Pemkab Salurkan Bantuan Kursi Roda dan Renovasi Rumah Warga

KOTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Bantuan berupa kursi roda dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diberikan kepada warga di Kecamatan Krembung dan Prambon.

Bantuan kursi roda diberikan kepada empat warga. Dua di antaranya merupakan warga Desa Wonomati, Kecamatan Krembung, yakni Anindya Keisha dan Siti Patimah. Sementara dua penerima lainnya adalah Soim, warga Desa Pejangkungan, serta Sholeh, warga Desa Prambon, Kecamatan Prambon.

Sedangkan bantuan renovasi RTLH diberikan kepada Beny, warga Desa Kedungrawan, dan Takim, warga Desa Krembung, Kecamatan Krembung. Satu penerima lainnya yakni Senan, warga Desa Pejangkungan, Kecamatan Prambon.

Bupati Sidoarjo Subandi menyerahkan langsung bantuan tersebut. Dia didampingi Dandim 0816

Sidoarjo, Baznas Sidoarjo, serta jajaran Forkopimka.

Subandi mengatakan, pemerintah akan terus berupaya hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya melalui program renovasi rumah warga yang kondisinya sudah tidak layak huni.

"Pemerintah terus hadir memberikan bantuan bagi warga kita yang tidak mampu, termasuk memberikan bedah rumah. Rumah ini nanti diperbaiki, bagian yang retak akan dibenahi, terasnya juga akan diperbaiki, termasuk kamar mandi dan plafonnya," ujar Subandi saat mengunjungi rumah Beny di Desa Kedungrawan.

Menurutnya, perbaikan rumah diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima. Kerusakan pada bagian rumah yang berpotensi membahayakan juga dapat segera diperbaiki. (dik/vga)

Menurutnya, perbaikan rumah diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima. Kerusakan pada bagian rumah yang berpotensi membahayakan juga dapat segera diperbaiki. (dik/vga)

Kementerian Pertanian Tarik 25 Merek Beras Fortifikasi

Kandungan Vitamin-Mineral Tak Sesuai SNI

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menarik peredaran 25 merek beras fortifikasi karena kandungan vitamin dan mineralnya tidak sesuai ketentuan. Kementan juga menemukan beras fortifikasi yang seharusnya dijual Rp 13.000-Rp 13.500 per kilogram, dipasarkan hingga Rp 57.000 per kilogram.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran mengatakan, temuan tersebut diketahui setelah 25 merek beras fortifikasi diuji di laboratorium. Hasilnya, kandungan vitamin dan mineral produk tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam SNI. "Sebanyak 25 merek beras fortifikasi tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai SNI," ujar Amran di Kantor Kementerian, Jakarta, kemarin (15/9).



HASIL PENELITIAN: Mentan Andi Amran Sulaiman (dua dari kanan) bersama Kepala BAKM M. Qodari (kanan) memberikan temuan beras fortifikasi di Jakarta kemarin (15/9).

Kerugian Konsumen

Kementan memperkirakan kerugian konsumen akibat dugaan praktik tersebut mencapai Rp 89 triliun. Nilai kerugian itu masih didalam bersama aparat penegak hukum.

Beras fortifikasi merupakan produk yang mendapat tambahan zat gizi seperti vitamin dan mineral. Produk tersebut antara lain diperuntukkan bagi kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil dan menyusui, anak dengan kondisi tengka atau malnutrisi, serta masyarakat kurang mampu.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qodari menyimpulkan, pemerintah berkomitmen melindungi konsumen dari oknum yang menjual beras fortifikasi bermasalah. "Presiden menaruh perhatian terhadap ketersediaan beras untuk masyarakat. Bukan hanya dari aspek ketersediaan, tetapi juga sampai dengan kualitas," ujarnya. (wan/aph)

LINTAS PELAYANAN

Kurangi Kecelakaan dan Kemacetan Bus Sekolah Solusi Transportasi Siswa

Sidoarjo, Bhirawa

Tahun 2026 ini Pemkab Sidoarjo ada rencana meluncurkan program bus antar-jemput siswa di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kabupaten Sidoarjo. Targetnya kemungkinan Bulan Desember 2026. Pj Sekda Sidoarjo, Ainur Rahman mengatakan program Dinas Perhubungan Sidoarjo ini sudah dianggarkan di APBD 2026. Saat ini masih ada penyempurnaan, tetapi pada Bulan Desember 2026, kegiatan sudah harus realisasi.

Lokasinya, sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Sidoarjo tahap awal. Tujuannya, agar anak sekolah aman, berangkat sekolah bisa tepat waktu dan orang tua tidak perlu repot antar-jemput. Contoh Kota/Kabupaten di Jatim yang sudah berjalan program Bus Sekolah, yakni Kota Surabaya "Suroboyo Bus Sekolah", gratis untuk pelajar SD-SMP. Rutenya tembus ke sekolah-sekolah negeri. Kota Malang, ada armada bus sekolah keliling. Fokus bantu anak ke sekolah dan ke GOR.

Kabupaten Gresik Sudah ada bus sekolah untuk wilayah utara dan industri. Kota Kediri, Bus sekolah gratis, kerja sama Dishub dan Dindik. Dan di Kabupaten Banyuwangi, armada untuk anak pelosok ke sekolah pusat kecamatan.

Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Budi Basuki SSTP, membenarkan ada program bus sekolah tahun 2026 ini. Nanti mendekati Bulan Desember akan segera dipublikasikan agar masyarakat Sidoarjo banyak tahu akan program pelayanan anak sekolah ini.

Kenapa Bus Sekolah Wajib Ada di Sidoarjo? Karena akan bisa mengurangi Kecelakaan. Anak sekolah yang masih SD-SMP kalau mengemudi sendiri atau nebang itu rawan. Dengan bus sekolah yang naik motor dan trayek tetap, risikonya jauh lebih kecil. [kus.ca]

RSUD Sibar Buka Layanan Cuci Darah

SIDOARJO, SURYA - Tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh demi menjalani cuci darah. Warga Sidoarjo bagian barat kini bisa mendapat layanan dialisis lebih dekat setelah RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) di Krian memiliki Gedung Pelayanan Instalasi Dialisis atau cuci darah.

Gedung pusat layanan cuci darah itu resmi dibuka, Selasa (15/9). Kehadiran layanan ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Sidoarjo Barat yang selama ini harus mencari fasilitas dialisis di tempat lain. Sebelum diresmikan, sudah ada 30 pasien yang mendaftar untuk mendapatkan layanan dialisis di RSUD Sidoarjo Barat.

Peresmian gedung dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Menurut Mimik, fasilitas baru itu dihadirkan untuk memberi pelayanan kesehatan terbaik sekaligus memudahkan masyarakat. Khususnya, warga yang tinggal di wilayah Sidoarjo bagian barat yang membutuhkan layanan dialisis atau cuci darah.

"Adanya layanan ini, masyarakat Sidoarjo yang tinggal di wilayah barat, sudah tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan dialisis atau cuci darah. Semua bisa dilayani di sini," kata Mimik.

Selama ini, layanan itu telah ditunggu dan dibutuhkan masyarakat. Buktinya,



SURYA / M. TAUFIK

DIALOG DENGAN PASIEN - Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat dialog dengan pasien saat meresmikan Gedung Pelayanan Instalasi Dialisis atau cuci darah RSUD Sidoarjo Barat (Sibar), Selasa (15/9).

sekarang ini saja sudah ada sebanyak 30 pasien yang mendaftar untuk mendapatkan layanan dialisis di RSUD Sidoarjo Barat.

Wabup Mimik berharap fasilitas Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat ini semakin baik, didukung tenaga kesehatan yang amanah serta memberi kenyamanan kepada pasien. Sebab, pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan obat-obatan dan fasilitas medis, tetapi juga pelayanan yang humanis dan memberi rasa nyaman.

"Orang sakit itu bukan hanya cari obat. Kalau kita melayani dengan ikhlas, memberikan senyuman, keramahan dan doa, insya Allah itu salah satu obat yang paling mujarab," ungkapnya.

Direktur Utama RSUD Sidoarjo Barat, dr Abdillah

Segaf Al Hadad, menjelaskan RS Sibar terus berusaha mempercepat pemenuhan tenaga kesehatan, alat kesehatan, serta sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan Instalasi Dialisis.

Saat ini sudah tersedia 14 mesin dialisis di rumah sakit itu. Terdiri atas 12 mesin untuk pasien reguler, 1 mesin pasien hepatitis, dan 1 mesin lainnya disiapkan sebagai cadangan.

RSUD Sidoarjo Barat juga telah melatih dokter umum dan perawat serta memproses kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui tahapan kredensialing. Semua itu sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan pelayanan instalasi dialisis.

"Mulai 1 September 2026, Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat telah resmi memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya. (ufi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

LINTAS PELAYANAN

Kurangi Kecelakaan dan Kemacetan Bus Sekolah Solusi Transportasi Siswa

Sidoarjo, Bhirawa

Tahun 2026 ini Pemkab Sidoarjo ada rencana melaunching program bus antar-jemput siswa di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kabupaten Sidoarjo. Targetnya kemungkinan Bulan Desember 2026. Pj Sekda Sidoarjo, Ainur Rahman mengatakan program Dinas Perhubungan Sidoarjo ini sudah dianggarkan di APBD 2026. Saat ini masih ada penyempurnaan, tetapi pada Bulan Desember 2026, kegiatan sudah harus realisasi.

Lokasinya, sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Sidoarjo tahap awal. Tujuannya, agar anak sekolah aman, berangkat sekolah bisa tepat waktu dan orang tua tidak perlu repot antar-jemput. Contoh Kota/Kabupaten di Jatim yang sudah berjalan program Bus Sekolah, yakni Kota Surabaya "Suroboyo Bus Sekolah", gratis untuk pelajar SD-SMP. Rutanya tembus ke sekolah-sekolah negeri. Kota Malang, ada armada bus sekolah keliling. Fokus bantu anak ke sekolah dan ke GOR.

Kabupaten Gresik Sudah ada bus sekolah untuk wilayah utara dan industri. Kota Kediri, Bus sekolah gratis, kerja sama Dishub dan Dindik. Dan di Kabupaten Banyuwangi, armada untuk anak pelosok ke sekolah pusat kecamatan.

Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Budi Basuki SSTP, membenarkan ada program bus sekolah tahun 2026 ini. Nanti mendekati Bulan Desember akan segera dipublis agar masyarakat Sidoarjo banyak tahu akan program pelayanan anak sekolah ini.

Kenapa Bus Sekolah Wajib Ada di Sidoarjo? Karena akan bisa mengurangi Kecelakaan. Anak sekolah yang masih SD-SMP kalau naik motor sendiri atau nebeng itu rawan. Dengan bus sekolah yang ada sopir dan trayek tetap, risikonya jauh lebih kecil. [kus.ca]

HARIAN
Bhirawa
Media Rakyat Sidoarjo



BPPD Sidoarjo genjot kesadaran warga membayar PBB.

BPPD Sidoarjo Genjot Warga Bayar PBB

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pemerintah Desa (Pemdes) Pulungan bersama Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo terus mengencangkan sosialisasi optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026.

Sosialisasi tersebut menyasar sekitar 25 warga Desa Pulungan yang masih memiliki kewajiban pembayaran PBB-P2. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi perpajakan serta pembayaran pajak tepat waktu.

Dalam kegiatan tersebut, warga tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai kewajiban membayar PBB-P2, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi terkait berbagai persoalan administrasi tanah dan objek pajak.

Perwakilan BPPD Sidoarjo, Heri, menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki persoalan administrasi seperti proses balik nama maupun tanah yang belum terdaftar tidak perlu ragu untuk melakukan konsultasi.

Menurutnya, proses administrasi dapat dilakukan sesuai ketentuan dan kelengkapan dokumen yang dimiliki masyarakat. Bahkan, warga yang objek tanahnya belum terdaftar juga dapat menyampaikan dan mendaftarkannya melalui mekanisme yang telah disediakan.

"Untuk kriteria balik nama bisa diproses dengan cepat sepanjang persyaratan dan dokumennya lengkap. Bagi warga yang tanahnya belum terdaftar juga bisa diterima untuk dilakukan pendataan," jelas Heri dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

BPPD Sidoarjo juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembayaran PBB-P2. Masyarakat dapat memanfaatkan form aplikasi yang telah disediakan maupun melakukan pengurusan secara manual, sehingga diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemdes Pulungan menilai sosialisasi seperti ini penting dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, masih adanya warga yang belum membayar PBB-P2 maupun belum memahami administrasi objek pajak perlu ditindaklanjuti dengan edukasi secara langsung.

Pemerintah desa juga mengajak masyarakat agar tidak menunggu sampai muncul persoalan administrasi baru kemudian mengurus data tanah maupun kewajiban pajaknya.

Optimalisasi PBB-P2 bukan semata-mata mengejar angka penerimaan pajak. Lebih dari itu, tertib pembayaran dan administrasi pajak menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan daerah. (md/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Salurkan Bantuan Kursi Roda dan Renovasi Rumah Warga

KOTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Bantuan berupa kursi roda dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diberikan kepada warga di Kecamatan Krembung dan Prambon.

Bantuan kursi roda diberikan kepada empat warga. Dua di antaranya merupakan warga Desa Wonomlati, Kecamatan Krembung, yakni Anindya Keisha dan Siti Patimah. Sementara dua penerima lainnya adalah Soim, warga Desa Pejangkungan, serta Sholeh, warga Desa Prambon, Kecamatan Prambon.

Sedangkan bantuan renovasi RTLH diberikan kepada Beny, warga Desa Kedungrawan, dan Takim, warga Desa Krembung, Kecamatan Krembung. Satu penerima lainnya yakni Senan, warga Desa Pejangkungan, Kecamatan Prambon.

Bupati Sidoarjo Subandi menyerahkan langsung bantuan tersebut. Dia didampingi Dandim 0816

Sidoarjo, Baznas Sidoarjo, serta jajaran Forkopimka.

Subandi mengatakan, pemerintah akan terus berupaya hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya melalui program renovasi rumah warga yang kondisinya sudah tidak layak huni.

"Pemerintah terus hadir memberikan bantuan bagi warga kita yang tidak mampu, termasuk memberikan bedah rumah. Rumah ini nanti diperbaiki, bagian yang retak akan dibenahi, terasnya juga akan diperbaiki, termasuk kamar mandi dan plafonnya," ujar Subandi saat men-

gunjungi rumah Beny di Desa Kedungrawan.

Menurutnya, perbaikan rumah diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima. Kerusakan pada bagian rumah yang berpotensi membahayakan juga dapat segera diperbaiki. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BPPD Sidoarjo Genjot Kesadaran Warga Bayar PBB

Sidoarjo, Memorandum
Pemerintah Desa (Pemdes) Pulungan bersama Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo terus mengencangkan sosialisasi optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026.

Sosialisasi itu, menasar sekitar 25 warga Desa Pulungan yang masih memiliki kewajiban pembayaran PBB-P2. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi perpajakan serta pembayaran pajak tepat waktu.

Dalam kegiatan tersebut, warga tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai kewajiban membayar PBB-P2, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi terkait berbagai persoalan administrasi tanah dan objek pajak.

Perwakilan BPPD Sidoarjo,



BPPD Sidoarjo genjot kesadaran warga membayar PBB.

Heri, menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki persoalan administrasi seperti proses balik nama maupun tanah yang belum terdaftar tidak perlu ragu untuk melakukan konsultasi.

Menurutnya, proses administrasi dapat dilakukan sesuai ketentuan dan kelengkapan dokumen yang dimiliki masyarakat. Bahkan, warga yang objek tanahnya belum terdaftar juga dapat menyampaikan dan mendaftarkannya melalui me-

kanisme yang telah disediakan.

"Untuk kriteria balik nama bisa diproses dengan cepat sepanjang persyaratan dan dokumennya lengkap. Bagi warga yang tanahnya belum terdaftar juga bisa diterima untuk dilakukan pendataan," jelas Heri.

BPPD Sidoarjo juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembayaran PBB-P2. Masyarakat dapat memanfaatkan form aplikasi yang telah disediakan maupun

melakukan pengurusan secara manual, sehingga diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemdes Pulungan menilai sosialisasi seperti ini penting dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, masih adanya warga yang belum membayar PBB-P2

maupun belum memahami administrasi objek pajak perlu ditindaklanjuti dengan edukasi secara langsung.

Pemerintah desa juga mengajak masyarakat agar tidak menunggu sampai muncul persoalan administrasi baru kemudian mengurus data tanah maupun kewajiban pajaknya. (sud/jok/ldn)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tahun Depan Libur Nasional 18 Hari, Cuti Bersama 8 Hari

JAKARTA - Pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2027. Jumlahnya tetap sama seperti tahun ini, yakni 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama.

Penetapan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menteri Ketenagakerjaan), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) Republik Indonesia Nomor 1205 Tahun 2026, Nomor 3 Tahun 2026, dan Nomor 2 Tahun 2026.

SKB tersebut ditandatangani oleh ketiga menteri, yakni Menag Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Rini Widyantini, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menko PMK.



SEPAKAT: Dari kiri, Menko PMK Pratikno, Menag Nasaruddin Umar, Men PANRB Rini Widyantini, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan keterangan kepada media setelah rapat koordinasi membahas libur nasional dan cuti bersama.

Sudah kita sepakati bahwa jumlah libur nasional itu adalah 18 hari di tahun 2027, mayoritas adalah keagamaan."

Pratikno
Menko PMK

Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin (15/9).

"Jadi, tadi sudah kita sepakati bahwa jumlah libur nasional itu adalah 18 hari di tahun 2027, mayoritas adalah keagamaan. Kemudian, jumlah cuti bersama tahun 2027 adalah sejumlah 8 hari. Jadi, ada 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama," ujar Pratikno usai rapat. Menurutnya, keputusan terse-

but dilakukan dengan mempertimbangan banyak hal. Misalnya, terkait kelancaran masyarakat dalam melaksanakan ritual keagamaan pada hari-hari besar keagamaan. Kemudian, posisi cuti bersama dengan kaitannya dengan hari Sabtu dan Minggu, termasuk waktu untuk mudik Lebaran dan lain-lain. Lebih lanjut, dia menyebut aturan cuti bersama ini berlaku

HARI LIBUR NASIONAL 2027

1 Januari, Jumat	Tahun Baru 2027 Masehi
5 Januari, Selasa	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah
6 Februari, Sabtu	Tahun Baru Imlek 2578 Kongzhi
8 Maret, Senin	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)
10-11 Maret, Rabu-Kamis	Idul Fitri 1448 Hijriah
26 Maret, Jumat	Wafat Yesus Kristus
28 Maret, Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
1 Mei, Sabtu	Hari Buruh Internasional
6 Mei, Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
17 Mei, Senin	Idul Adha 1448 Hijriah
20 Mei, Kamis	Hari Raya Waisak 2571 BE
1 Juni, Selasa	Hari Lahir Pancasila
6 Juni, Minggu	1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah
15 Agustus, Minggu	Maulid Nabi Muhammad SAW
17 Agustus, Selasa	Proklamasi Kemerdekaan
25 Desember, Sabtu	Kelahiran Yesus Kristus
26 Desember, Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah

CUTI BERSAMA 2027

5 Februari, Jumat	Tahun Baru Imlek 2578 Kongzhi
9, 12, dan 15 Maret, Selasa, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1448 Hijriah
25 Maret, Kamis	Wafat Yesus Kristus
18 Mei, Selasa	Idul Adha 1448 Hijriah
19 Mei, Rabu	Hari Raya Waisak 2571 BE
24 Desember, Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

Sumber: Kemenko PMK

bagi aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan bagi swasta, sifat cuti bersama adalah fakultatif.

"Jadi, bisa ada, bisa dilakukan, bisa tidak, begitu ya, Pak Menteri. Te-

naga Kerja," ungkapnya. Pratikno kemudian merinci tanggal dan hari mana saja yang diputuskan sebagai libur nasional dan cuti bersama. Misalnya, pada Februari 2027 terdapat libur berkaitan dengan Tahun Baru Imlek. Pemerintah memutuskan cuti bersama pada 5 Februari untuk melengkapi Tahun Baru Imlek Kongzhi pada 6 Februari 2027. "Kemudian, yang bulan Maret ini yang banyak hari libur, yaitu libur nasionalnya 8 Maret itu Hari Suci Nyepi, kemudian 10 dan 11 Maret itu Idulfitri, kemudian 26 Maret itu Wafat Yesus Kristus, 28 Maret Kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, ada 5 hari libur nasional pada bulan Maret 2027. Sedangkan cuti bersamanya jatuh pada tanggal 9, 12, 15, dan 25," paparnya. (mla/all)

Jawa Pos

Kementerian Pertanian Tarik 25 Merek Beras Fortifikasi

Kandungan Vitamin-Mineral Tak Sesuai SNI

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menarik peredaran 25 merek beras fortifikasi karena kandungan vitamin dan mineralnya tidak sesuai ketentuan. Kementan juga menemukan beras fortifikasi yang seharusnya dijual Rp 13.000-Rp13.500 per kilogram, dipasarkan hingga Rp 57.000 per kilogram.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Megantika, temuan tersebut diketahui setelah 25 merek beras fortifikasi diuji di laboratorium. Hasilnya, kandungan vitamin dan mineral produk tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam SNI. "Sebanyak 25 merek beras fortifikasi tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai SNI," ujar Amran di Kantor Kementan, Jakarta, kemarin (15/9).



HASIL PENELUSURAN: Mentan Andi Amran Sulaiman (dua dari kanan) bersama Kepala Bakom M. Qodari (kanan) membeberkan temuan beras fortifikasi di Jakarta kemarin (15/9).

Kementan selanjutnya menarik produk yang terindikasi melanggar ketentuan dari peredaran. Izin produsen juga akan dicabut dan pihak yang diduga terlibat diproses sesuai ketentuan hukum.

Amran menilai temuan tersebut merugikan kon-

sumen. Sebab, beras fortifikasi dijual dengan harga lebih tinggi, tetapi kandungan vitamin dan mineralnya tidak sesuai dengan ketentuan. "Selisihnya bisa mencapai Rp 44.100 per kilogram. Ini sangat merugikan konsumen," katanya.

Kerugian Konsumen

Kementan memperkirakan kerugian konsumen akibat dugaan praktik tersebut mencapai Rp 89 triliun. Nilai kerugian itu masih didalami bersama aparat penegak hukum.

Beras fortifikasi merupakan produk yang mendapat tambahan zat gizi seperti vitamin dan mineral. Produk tersebut antara lain diperuntukkan bagi kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil dan menyusui, anak dengan kondisi tengkes atau malnutrisi, serta masyarakat kurang mampu.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom) M. Qodari menyampaikan, pemerintah berkomitmen melindungi konsumen dari oknum yang menjual beras fortifikasi bermasalah. "Presiden menaruh perhatian terhadap ketersediaan beras untuk masyarakat. Bukan hanya dari aspek ketersediaan, tetapi juga sampai dengan kualitas," ujarnya. (wan/aph)

Jawa Pos

Pensiunan TNI Terima Bansos, Warga Protes Kades Gelam

43 Kepala Desa
Mengadu DPRD soal
Bantuan Salah Sasaran

SIDOARJO – Persoalan bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran membuat banyak kepala desa (kades) di Kota Delta kewalahan. Sebanyak 43 kades mengadukan carut-marutnya data penerima ke dewan, Senin (14/9) sore. Mereka berharap ada penyelesaian mengenai masalah tersebut.

Keluhan disampaikan Kepala Desa Gelam Mochamad Muslich. Dia mengaku diprotes warga setelah adanya pensiunan TNI yang menerima bantuan. Sedangkan, masih ada masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih sulit justru belum mendapatkan bantuan.

"Rumah pensiunan itu cukup besar dan megah. Kondisinya juga sangat baik," kata Muslich. Dia mengaku kebingungan menghadapi warga. Sebab, data penerima bansos tidak berasal dari desa.

Muslich tidak ingin langsung menyimpulkan bantuan tersebut salah sasaran. Dia justru meminta data penerima kembali diverifikasi. Pengecekan diperlukan untuk memastikan kondisi penerima masih sesuai dengan data desil dan kriteria bantuan. "Saya berharap instansi yang memiliki kewenangan bisa melakukan pengecekan," tambah Muslich.



SAMPAIKAN KELUHAN: Sebanyak 43 kepala desa mengikuti hearing di Kantor DPRD Sidoarjo, Senin (14/9) sore.

TEMUAN MASALAH BANSOS

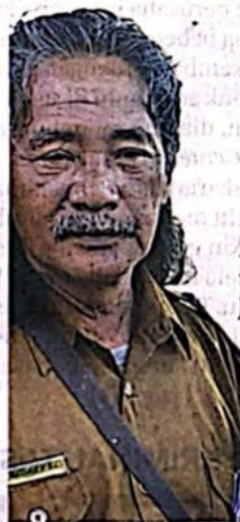
Ada warga ber-penghasilan rendah belum menerima bantuan

Warga temukan pensiunan aparat mendapat bansos

Bansos juga diterima pelaku judol

Kades diprotes karena bantuan tidak tepat

SUMBER: HEARING DI DPRD SIDOARJO



Rumah pensiunan itu cukup besar dan megah. Kondisinya juga sangat baik."

**Mochamad
Muslich**
Kepala Desa
Gelam

Penjudi Online Terdaftar Penerima Manfaat

Keluhan juga disampaikan Kades Simogirang Khusnul Khuluk. Dia menyebut ada tiga warganya yang bermain judi online tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. "Mungkin sewaktu didata mereka belum bermain judi online," katanya.

Kondisi tersebut menunjukkan data penerima bantuan bisa berubah seiring waktu. Karena itu, Khusnul menilai verifikasi dan pembaruan data perlu dilakukan secara berkala. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui perubahan kondisi

ekonomi warga dan memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menyebut persoalan data bansos perlu ditindaklanjuti agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Penerima yang secara nyata sudah mampu perlu dievaluasi. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada verifikasi kondisi ekonomi penerima. "Tidak bisa hanya melihat status. Data penerima harus diverifikasi secara menyeluruh," kata Bangun. (ful/hen)

Jawa Pos



TAK BERIZIN: Petugas Satpol PP Sidoarjo menempel surat peringatan pada rombongan pedagang di frontage road Waru.

Persempit Frontage Waru, 66 Bangli Ditertibkan

SIDOARJO – Bangunan liar (bangli) di sepanjang *Frontage Road* (FR) Waru mulai ditertibkan kemarin (15/9). Ada 66 bangunan di atas lahan milik pemerintah dan PT KAI yang menjadi sasaran penataan. Bangunan tersebut dinilai mempersempit akses dan membuat kawasan di sekitar jalur FR semrawut.

Proses penertiban melibatkan aparat gabungan. Selain satpol PP, ada TNI, Polri, dan Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska). Mereka mendatangi satu per satu pemilik bangunan untuk menyampaikan surat peringatan.

Para pemilik masih diberi kesempatan membongkar bangunan secara mandiri. Tenggat yang diberikan selama tujuh hari. Jika hingga batas waktu tersebut bangunan belum dibongkar, petugas akan melakukan penertiban.

"Kami minta pemilik membongkar bangunan sendiri sebelum satpol PP bergerak," kata Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih An-

dono. Dia mengatakan, penertiban diperlukan agar fungsi FR sebagai jalur alternatif bisa berjalan optimal. Keberadaan bangunan yang berdiri di sekitar jalur dinilai membuat ruang akses menjadi lebih sempit dan kawasan terlihat kumuh.

Proyek Dilanjutkan Bulan Depan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUB-MSDA) Sidoarjo Muhammad Makhmud mengatakan pembangunan jalur FR masih terus dilanjutkan. Salah satu proyek yang disiapkan adalah sambungan FR Buduran menuju Jalan Jenggolo. Pekerjaan tersebut ditargetkan dimulai bulan depan.

"Proyek penyambungan FR rencana dilanjut bulan depan," katanya. Dia mengatakan, enam bangunan bekas rumah dinas KAI di sisi selatan Jalan Antartika juga akan dibongkar untuk membuka sambungan jalan sekitar 50 meter. (ful/hen)

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

CEK KONDISI: Wabup Mimik Idayana (kiri) bersama Ketua DPRD Abdillah Nasih (tengah) dan Direktur RSUD Sidoarjo Barat dr Abdillah Segaf Alhadad (kanan) mengunjungi salah satu pasien gagal ginjal kemarin (15/9).

Banyak Aduan, Wabup Mimik Minta RSUD Perbaiki Layanan

SIDOARJO – Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meminta petugas rumah sakit tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pesan tersebut disampaikan saat peresmian Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat kemarin (15/9).

Mimik mengaku masih banyak menerima aduan dari masyarakat mengenai pelayanan di rumah sakit. "Saya itu banyak menerima laporan melalui DM terkait pelayanan rumah sakit dan langsung saya minta segera

ditindaklanjuti," katanya.

Dia menilai, keluhan masyarakat adalah hal yang wajar. Namun, persoalan harus diatasi. Mimik mengingatkan agar petugas tidak terlalu membebani pasien dengan prosedur pelayanan. Masyarakat tidak boleh di-pingpong terkait administrasi.

Direktur RSUD Sidoarjo Barat dr Abdillah Segaf Alhadad menjelaskan, layanan dialisis di rumah sakit telah berjalan sejak 1 September 2026. Hingga Selasa (15/9),

tercatat sudah 77 kali pelayanan dialisis diberikan kepada masyarakat. "Kini, masyarakat yang membutuhkan cuci darah tidak perlu mencari layanan terlalu jauh. Terutama pasien di wilayah barat Sidoarjo," ujarnya.

Dia menyebut instalasi dialisis memiliki 14 mesin. Sebanyak 12 mesin digunakan untuk pasien reguler, sedangkan dua mesin lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan pelayanan tertentu. (ful/hen)

Jawa Pos

Dua Bersaudara di Tropodo Putus Sekolah, Terbelit Ekonomi dan Trauma

Dispendik Akan Tindakanlanjuti

WARU - Harapan untuk kembali mengenakan seragam sekolah masih disimpan keluarga M Zainal Abidin dan Dewi Umiya Wati. Keterbatasan ekonomi membuat dua dari empat anak pasangan asal Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, itu harus berhenti sekolah.

Kedua anak tersebut adalah WD, 18, dan IA, 16. WD sebelumnya bersekolah di SMA kawasan Waru, sedangkan IA merupakan siswa SMP swasta di Waru.

WD berhenti sekolah sejak 2024 ketika masih duduk di



BUTUH PERHATIAN:
Kondisi keluarga Dewi Umiya Wati di Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo.

kelas X. Sementara IA berhenti sekolah pada 2025 saat duduk di kelas IX. Saat itu, dia tinggal sekitar tiga bulan lagi

menghadapi ujian.

Dewi Umiya Wati, 36, mengatakan, keputusan kedua anaknya berhenti sekolah dip-

engaruhi persoalan berbeda. WD disebut tidak betah di sekolah dan sempat ingin pindah ke sekolah lain. Sementara IA mengalami trauma setelah mendapat hukuman dari sekolah karena beberapa kali tidak masuk.

IA sebelumnya kerap absen karena harus merawat ibunya yang mengalami sakit lambung selama sekitar 10 bulan. Meski keluarga telah menjelaskan kondisi tersebut kepada pihak sekolah, IA tetap mendapat hukuman membersihkan kamar mandi.

"Sudah empat kali menyuruh IA sekolah. Tiga guru empat

kali ke sini. Dikasih support selalu. IA sudah enggak mau, takutnya disuruh membersihkan kamar mandi lagi," ujar Dewi, Selasa (15/9).

Menurut Dewi, pengalaman tersebut membuat IA trauma. Padahal, anak keduanya masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Hanya saja, dia tidak ingin kembali ke sekolah lama.

Dewi berharap IA mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah lain, terutama yang lokasinya dekat dengan rumah dan sesuai dengan kemampuan ekonomi

keluarga. "Kalau saya selaku orang tua ingin mendapat ijazah, menyekolahkan lagi," ungkapnya.

Di sisi lain, persoalan ekonomi menjadi kendala lain yang dihadapi keluarga tersebut. Zainal yang menjadi tulang punggung keluarga bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tidak menentu. Sementara Dewi merupakan ibu rumah tangga yang juga merawat dua anak mereka yang masih duduk di bangku TK. "Keluarga kami masuk desil dua," tuturnya.

Untuk pendidikan IA, keluarga sebelumnya harus membayar SPP sekitar Rp 190 ribu per bulan, belum termasuk

• Ke Halaman 10



Dua Bersaudara ...

uang saku dan biaya kegiatan sekolah. Sementara SPP WD sekitar Rp 250 ribu per bulan.

Beban keluarga bertambah karena dua anak lainnya yang merupakan saudara kembar juga sudah bersekolah di TK. Untuk biaya masuk saja, keluarga harus mengeluarkan sekitar Rp 2 juta untuk dua anak. Masing-masing juga dikenai SPP Rp 110 ribu

sampai Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu sekarang. Tapi itu pun tidak selalu rutin setiap hari," jelasnya.

Maskuri menilai persoalan ekonomi turut memperbesar masalah pendidikan yang dihadapi kedua anak tersebut. Apalagi, keluarga harus memenuhi kebutuhan empat anak.

Namun, dia menegaskan persoalan Irhas tidak semata-mata berkaitan dengan biaya pendidikan. Pengala-



Mondar-mandir di Jalur KA, Pria di Waru Tertabrak KA

WARU - Seorang pria berinisial S, 56, warga Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Sidoarjo, tertabrak Kereta Api (KA) Sri Tanjung di jalur rel kawasan Jalan Kolonel Sugiono, Desa Waru, Senin (14/9) siang.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.51 WIB. Sebelum kejadian, korban terlihat mondar-mandir di sekitar jalur rel. Warga yang mengetahui keberadaan korban sempat mengingatkan agar menjauh dari perlintasan kereta api.

Kapolsek Waru Kompol Miftahul Amin mengatakan, saat perlintasan kereta api ditutup, korban sempat duduk di pinggir jalan. Namun, ketika kereta api mulai mendekat, korban justru masuk dan menyeberangi jalur rel.

"Korban sebelumnya terlihat mondar-



BARANG BUKTI: Polisi saat mengamankan motor korban usai kecelakaan di Krian.

mandir di sekitar jalur kereta api. Warga juga sudah sempat mengingatkan, tetapi tidak dihiraukan," kata Miftahul Amin.

Korban kemudian tertabrak KA Sri Tanjung yang melaju dari arah utara menuju selatan dengan rute Surabaya-Banyuwangi. Setelah kejadian, petugas bersama warga langsung melakukan evakuasi.

"Ketika kereta api mendekat, korban menyeberang sehingga akhirnya tertabrak KA Sri Tanjung," jelasnya.

● Ke Halaman 10



Mondar-mandir ...

Berdasarkan keterangan keluarga, korban diketahui memiliki riwayat depresi dan sebelumnya menjalani pengobatan di RS Menur Surabaya. Keluarga juga menyebut korban kerap ber-

jalan di sekitar jalur rel kereta api.

Usai kejadian, korban dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Jatim. Polisi juga melakukan penanganan di lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui kronologi kejadian. (sur/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Penolakan Warga Karangbong Soal Peningkatan Kelas Jalan Berujung di DPRD Sidoarjo



Siska Prestiwati
15 Sep 2026 15:15

TERUPDATE PEMERINTAHAN POLITIK EKONOMI BISNIS 0

18

3 MINUTES READING





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

NASIONAL

Tindak Lanjuti Surat Aduan Jalan Surowongso, Komisi C DPRD Sidoarjo Jadwalkan Sidak Lapangan

Imam Syafii



Penulis Aktif

TIM REDAKSI JATIMSATUNews

15 September 2026, 20:58 WIB · Diperbarui 15 September 2026, 20:58 WIB

BAGIKAN



Simpan

Komentar

Bagikan





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hearing Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo, Warga Desa Karangbong Tolak Peningkatan Mutu Jalan

4 menit membaca

View : 11

admin

PEMERINTAHAN - 15 Sep 2026





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Hearing dengan DPRD, Kades se-Sidoarjo Keluhkan Akurasi Data Penerima Bansos

15 September 2026 21:46 WIB -
oleh redaksi



Komisi D DPRD Sidoarjo hearing dengan Kades perwakilan dari 18 Kecamatan membahas DTSEN

Sidoarjo, petisi.co – Akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian para kepala desa di Kabupaten Sidoarjo. Mereka meminta pemerintah memperkuat proses verifikasi dan pemutakhiran data agar penyaluran berbagai program bantuan sosial benar-benar menasar warga yang membutuhkan.

Persoalan tersebut mengemuka dalam hearing antara Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sidoarjo dengan Komisi D DPRD Sidoarjo, Senin (14/9/2026).

Rapat Dengar Pendapat itu juga dihadiri Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo.

Dalam forum tersebut, sejumlah kepala desa menyampaikan temuan adanya perubahan desil kesejahteraan warga yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.

Akibatnya, terdapat masyarakat yang masih membutuhkan bantuan namun status datanya mengalami perubahan.

Kepala Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Chusnul Chuluq, menyampaikan kondisi nyata masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembaruan data sosial.

Menurutnya, pemerintah desa memiliki informasi paling mutakhir terkait perubahan ekonomi warga.

“Kondisi riil masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam pembaruan data agar warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tetap memperoleh perhatian pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menilai keterlibatan pemerintah desa dalam proses pendataan perlu diperkuat.

“Peran desa tidak hanya sebatas melengkapi administrasi, melainkan ikut memberikan masukan berdasarkan fakta di lapangan,” serunya.

Data desil yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan kerap menuai protes warga. Seperti yang diungkapkan Kades Gelam Kecamatan Candi Mochamad Muslich.

Ia mengaku diprotes warga gara-gara ada pensiunan TNI yang menerima bantuan. Warga mempertanyakan penerima bantuan tersebut karena masih ada masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah dibawahnya justru tidak mendapatkan bantuan.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Respons Aduan Warga Karangbong, DPRD Sidoarjo Gelar Hearing Soal Infrastruktur dan Keselamatan Jalan

📍 Pimred Radar 🕒 15 September 2026 ⏱ 5 minutes read 💬 0

